ecozine vol. 4

DESEMBER 2023
APRIL - MEI 2024

Candu Book

ECOZINE VOLUME 4

2024

KONTRIBUTOR
Anonim (Perpusjal Baca Kami)
Krisnaldo Triguswinri
Bintang Prakasa
Riski Saputra
Kaum Marjinal
Neesa

EDITOR
Hi The Strange

Layouter
Hi The Strange

DAFTAR ISI

Hal. 3 **Basa Basi**

Hal. 4 **Rekomendasi Lagu**
Anonim (Perpusjal Baca Kami)

Hal. 6 **Terhanyut Udara**
Anonim (Perpusjal Baca Kami)

Hal. 7 **Perempuan Papua, Alam, dan Kejahatan Proyek Food Estate Negara**
Krisnaldo Triguswinri

Hal. 22 **Perjalanan**
Bintang Prakasa

Hal. 23 **Hutan Hitam Putih**
Riski Saputra

Hal. 24 **Jangan Rusak Hijau Kami**
Kaum Marjinal

Hal. 26 **Teruslah Tumbuh Tanpa Ragu**
Kaum Marjinal

Hal. 27 **Terus Menanam, Teruslah Tumbuh**
Neesa

Hal. 28 **Tambang Harus Tumbang**
Neesa

BASA BASI

Ecozine merupakan wadah responsif terhadap keadaan alam yang tidak pernah baik-baik saja. Sifat manusia yang menganggap diri sebagai pusat alam semesta (antroposentris) adalah salah satu penyebabnya. Antroposentris lebih lanjut menjelma jadi beberapa wujud seperti patriarki, kapitalisme, neoliberalisme dan masih banyak lagi. Bentuk penghancuran alam kemudian saling menopang satu sama lain menjadi pondasi kerusakan multisektoral yang mana korbannya tidak tebang pilih.

Selain beberapa wujud di atas masih adakah penyebab kerusakan alam lain? Ataukah isu alam hanya mitos? Adakah upaya yang bisa dilakukan guna memperlambat laju kerusakan? Ataukah kita hanya akan berpangku tangan menunggu kiamat datang?

Oh….atau mungkin kau punya keresahan tersendiri mengenai alam? Terkhusus mengenai gerakan penyelamatan alam yang dinilai utopis? Zine ini hadir sebagai salah satu alternatif mencari, menemukan, menyampaikan keresahan atau bahkan solusi yang tidak atau mungkin saja sudah sering dipikirkan sebelumnya. Tidak terpaku pada bentuk formal–lazim kaidah tekstual saja namun juga visual.

Zine ini tidak akan pernah jadi sesuatu hal yang sempurna. Namun, lebih baik berupaya dengan cinta dan kesenangan daripada tidak melakukan apapun.

Di Bumi yang Sekarat
Mei 2024

REKOMENDASI LAGU (SLANK - NGGAK PERAWAN LAGI)

Anonim (Penjaga Lapak Perpusjal Baca Kami)

Meski judulnya terdengar nyeleneh, namun makna lagu tersebut berbicara tentang rusaknya lingkungan yang tak lagi seindah dulu. Lingkungan tercemar dengan banyaknya sampah dan pepohonan gundul. Lagu Slank "Nggak Perawan Lagi" mencerminkan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap ekosistem. Itu sebabnya Slank memberi judul "Nggak Perawan Lagi".

Berenang di tepi pantai // Banyak minyak, sampah, dan kotoran // Tercebur ombak, badan rusak, bulunya lengket // lepaskan kail dari tepi sungai // airnya coklat dan berbusa // ikan akan tersangkut di dalamnya dan kulit akan gatal dan berbau // Lautku nggak biru, nggak biru lagi // Sungaiku nggak jernih, nggak jernih lagi // Alamku nggak bagus, nggak bagus lagi // alamku nggak perawan, nggak perawan lagi //

Lirik awal menggambarkan pantai yang tercemar minyak, sampah, dan kotoran. Sang penulis lirik mengilustrasikan sedang bermain di tepi pantai sambil memancing ikan di tepi sungai. Aktivitas manusia merusak kebersihan air, merusak ekosistem laut, dan mengubah kondisi alam secara signifikan.

Lereng dan pegunungan yang penuh dengan lapangan golf dan vila // Tidak ada yang dapat menampung air. Kota yang kebanjiran // Melihat hutan dari pesawat, dimana solusinya untuk Indonesia? // Imajinasiku adalah hutan tandus yang tak ada apa-apanya // Gunungku nggak hijau, nggak lagi hijau // Hutanku nggak lebat, nggak lebat lagi lebat // Sifatku tidak lagi indah // Alamku nggak perawan, nggak perawan lagi.

Sementara pada lirik selanjutnya, lereng bukit dan pegunungan diubah menjadi lapangan golf dan vila , menggambarkan perubahan dramatis dalam penggunaan lahan. Lirik ini juga menyoroti dampak perubahan seperti banjir perkotaan. Pertanyaan “Di manakah solusi bagi Indonesia?” mencerminkan kebingungan mengenai cara mengatasi permasalahan lingkungan yang tidak ada ujungnya. Kita jaga alam, alam jag kita. Gambaran hutan yang kosong dan tandus menyampaikan gambaran kesedihan atas kerusakan yang ditimbulkan. Secara keseluruhan, teks-teks ini menggambarkan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di Indonesia.

Penggunaan istilah “nggak perawan” dapat diartikan sebagai hilangnya keaslian dan kemurnian alam, serta seruan bagi terwujudnya dan perbaikan kondisi lingkungan hidup.

Selanjutnya ada sedikit puisi yang mencerminkan keadaan di sekitar desa tempat tinggal penulis, mempunyai sebuah bangunan proyek megah PLTGU terbesar se-Asia Tenggara.

TERHANYUT UDARA

Anonim (Penjaga Lapak Perpusjal Baca Kami)

suara bergemuruh, bergema
pada malam yang hening, hening
kulalui jalan Cilamaya
bermain gitar bersama, kawan-kawan

PLTGU, sang raksasa,
terbesar se-Asia Tenggara
ada kisah gelap
tersembunyi di balik riuhnya rupiah

dibunuh perlahan, terhanyut udara
dibungkam negara
dedaunan meratap
suara burung pun serak
pohon-pohon menangis
warga-warga mengemis
laut pun menangis

Bisakah kau dengar jerit alam yang terluka?
Lingkungan yang berdarah-darah
Aku bertanya-tanya

terus menyuarakan rasa sakit
menulis puisi perlawanan
menyuarakan rasa sakit
berharap perubahan

dimana keadilan? dimana kepedulian?

PEREMPUAN PAPUA, ALAM, DAN KEJAHATAN PROYEK FOOD ESTATE NEGARA

Krisnaldo Triguswinri

Krisis lingkungan semakin kompleks ketika kepentingan penaklukan alam mengendarai proyek pembangunan, juga berakibat terhadap kehidupan kultural masyarakat. Terlebih, pelaksanaan pembangunan diaktualisasikan sebagai pencapaian kebutuhan kehidupan jangka panjang. Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) merupakan wujud kepengaturan negara untuk memenuhi pasokan pertanian dan perkebunan berskala nasional yang berdampak terhadap pengalihan hutan di Papua. Setidaknya, dibutuhkan lahan sekitar 1.283.000 hektar untuk investasi pertanian (Dewi, 2016).

Pelaksanaan MIFEE juga menjadi perpanjangan tangan dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs) karena berupaya mewujudkan pengentasan kelaparan dan kemiskinan melalui kedaulatan pangan. Tentu ini menjadi dilematis, sebab, pembukaan lahan secara massif bersinggungan dengan capaian target SDGs yang berusaha untuk melakukan perlindungan, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem hutan. Terlebih, pendekatan yang digunakan untuk produksi pangan berupa business as usual approach yang akan menyebabkan deforestasi massal.

Secara bertahap, implementasi MIFEE tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada komunitas di sekitar hutan yang sehari-hari bergantung pada hutan untuk penyediaan makanan secara langsung. Dengan hilangnya hutan, maka hilang pula layanan ekosistem yang menyediakan pemenuhan kehidupan komunitas tersebut (Katila, 2020). Salah satu studi Sajogyo Institute terkait pengembangan hutan tanaman industri (HTI) di Sumatera Selatan (Siscawati dan Noer, 2015) menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang hidup di sekitar kawasan hutan mengalami perubahan penguasaan sumber daya hutan. Akibat perubahan tersebut, perempuan menjadi teralienasi karena pada masa sebelum masifnya pengembangan HTI, perempuan memperoleh kebutuhan secara langsung dari hutan. Namun, setelah adanya ekspansi ekstraktif hutan, pengalaman perempuan terhadap hutan lebih banyak berkaitan dengan pencemaran hutan.

Meskipun mengedepankan cita-cita pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian kedaulatan pangan, namun ternyata hanya sebatas simbolisasi (Katila dkk, 2020). Sebab, MIFEE pada hakikatnya menghilangkan esensi kultural masyarakat adat Papua yang sangat bergantung terhadap alam. Marind-Anim adalah komunitas etnis terbesar yang tinggal di kawasan mega proyek MIFEE. Bersama kelompok etnis lainnya, seperti Muyu, Mandobo, Mappi, dan Asmat, komunitas-komunitas etnis ini merupakan kelompok yang termarjinalisasi dari realisasi MIFEE.

Ini menunjukkan kepentingan pemerintah telah mengabaikan lokalitas setempat berupa basis wilayah kultural. Mengubah lahan hutan sagu menjadi lahan industri pertanian secara luas, tidak hanya mengancam biodiversitas ekosistem hutan tetapi juga entitas budaya komunitas yang tinggal disekitar hutan. Artinya, kepengaturan negara dalam sektor pertanian bertransformasi menjadi proses pengeksklusian yang tampil dalam lingkup budaya dan lingkungan. Kapabilitas komunitas etnis yang bertumpu pada perempuan untuk menjaga keseimbangan alam secara berkelanjutan pun dipinggirkan.

Perkembangan masyarakat bersifat materialistik inilah yang menjadi sentral perdebatan etika ekologi antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Masing-masing merupakan antitesis pemikiran yang menumpukan manusia berelasi terhadap alam. Antroposentrisme menempatkan bahwa alam harus menyesuaikan kebutuhan manusia. Sebaliknya, ekosentrisme menekankan keterkaitan antara manusia dan aspek non manusia, yaitu alam dan pengaturan ekologis lainnya, yang melampaui kemampuan pemenuhan material manusia. Kedua isme etika lingkungan ini bermuara pada narasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Namun, simplifikasi persoalan lingkungan tidak terbatas hanya pada isme tersebut. Sebab, yang dibutuhkan ialah rumusan kritis yang mampu berkontribusi sebagai alat politik pembebasan (Setiawan, 2017).

Munculnya ekofeminisme sebagai pendekatan feminisme ekologi dimulai sejak tahun 1980-an, telah banyak berkontribusi baik untuk perjuangan aktivis maupun untuk memetakan teori hubungan antara penindasan perempuan dan dominasi alam. Namun disisi lain, membangkitkan banyak kekhawatiran karena takut terperangkap dalam penindasan dualistik dengan menyelaraskan kembali perempuan dengan alam, tubuh, dan lingkungan (Mahoney, 2016). Namun, sebenarnya ekofeminisme berargumen untuk mendekonstruksi secara kritis atas dominasi historis, budaya, dan sosial terhadap hubungan perempuan dan alam.

Pada dasarnya, membawa perempuan kembali ke alam bukan berarti upaya menantang penindasan hierarki dualistik (Butler 1990). Melainkan sebuah bentuk perhatian kritis terhadap persimpangan antara penindasan perempuan dan krisis lingkungan. Realisasi dari gagasan ekofeminisme dilakukan dengan meningkatkan kesadaran agar mengoperasikan politik kekuasaan yang melibatkan penderitaan perempuan yang menjadi kelompok terpinggirkan, bawahan, dan lian (Putnam Tong, 2009).

Relasi perempuan dan alam dapat dilihat dari perkembangan sistem produksi masyarakat. Apabila mengacu pada perspektif Marxis, perkembangan masyarakat dihasilkan dari sistem kerja dalam memproduksi barang material. Mekanisme mengenai perubahan cara pemenuhan kebutuhan material merupakan hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri (Suseno, 2009). Basis produksi masyarakat primitif bertumpu pada pemenuhan material dari alam secara langsung. Ini terlihat dari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki diposisikan bekerja untuk berburu, sedangkan perempuan bertugas meramu makanan.

Relasi pembagian kerja terhadap alam mengkategorikan laki-laki sebagai penguasa alam yang memiliki kuasa untuk merusak alam, dan perempuan dilekatkan pada fungsi merawat alam (Susilawati, 2017). Selanjutnya, pada perkembangan masyarakat modern, pembagian kerja yang organik telah menggiring sistem kerja pada ranah keterasingan dari alam. Hal ini menjadi konsekuensi dari perkembangan tenaga produktif melalui hiper-industrialisasi yang bertujuan memperalat alam demi kepuasan manusia.

Sejak 2008 muncul berbagai kekhawatiran akan kerentanan terkait dengan perubahan iklim, gejolak harga, dan kekurangan pangan global. Narasi kebijakan di kawasan global selatan memberikan orientasi kebijakan yang sehubungan dengan kebijakan pangan melalui bingkai 'kedaulatan pangan', 'swasembada pangan' dan 'ketahanan pangan'. Menurut McCarthy dan Krystof (McCarthy dan Krystof, 2017) narasi ini berfokus pada kedaulatan pangan nasional yang mendukung pertanian berskala besar yang mengabaikan permasalahan yang akan dihadapi oleh komunitas pedesaan terkait persoalan kemiskinan pangan dan marjinalisasi.

Agenda kebijakan pangan dengan tema ‘swasembada pangan’ ini sebenarnya melegitimasi model sistem pangan berbasis industri yang didasarkan pada kontrol perusahaan atau perusahaan negara atas tanah dan rantai komoditas pokok tertentu. Masalah utama harus dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan pangan merupakan kebutuhan politik negara yang dapat menimbulkan kerentanan produksi lokal. Sebab, ketahanan pangan dipetakan secara kuantitatif, tanpa mempertimbangkan persoalan kultural yang akan muncul.

MIFEE merupakan bentuk ‘proyek kekhawatiran bersama’ terhadap krisis kekurangan produksi yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Akan tetapi, proyek MIFEE yang disahkan oleh negara menghasilkan titik kritis Orang Marind karena tereksklusi oleh mega proyek MIFEE. Ekofeminisme sebagai varian gagasan tentang etika ekologi juga merupakan suatu pemikiran yang menawarkan gagasan tentang keterhubungan perempuan terhadap alam secara konseptual, simbolik, dan linguistik. Dalam perkembangannya, ekofeminisme memiliki ragam pemikiran yang menitikberatkan pada pertanyaan tentang apakah relasi perempuan dan alam benar-benar berkaitan atau secara kultural perlu adanya pemisahan.

Tujuan artikel ini berupaya mengeksplorasi proses eksklusi yang terjadi di dalam relasi perempuan Papua dengan alam sebagai akibat yang dihasilkan dari proyek pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, pertanyaan penelitian dalam artikel ini yaitu, “Bagaimana posisi perempuan adat Papua terkait dengan opresi terhadap alam dalam konteks pelaksanaan MIFEE?” Pada dasarnya, persoalan lingkungan dapat dipahami berada pada dua poros yaitu instrumental dan spiritual yang mencerminkan pendekatan antroposentrisme dan ekosentrisme (Thompson, Suzanne, dan Michelle, 1994).

Argumen tulisan ini berpendapat bahwa keberceraian manusia dan alam bertolak dari pemisahan relasi perempuan terhadap alam. Studi-studi sebelumnya cenderung masih belum menempatkan kepentingan pembangunan berkelanjutan dalam analisisnya. Tulisan ini berangkat dari pendekatan ekofeminisme sebagai pisau analisis. Tujuan tulisan ini terletak pada keinginan untuk menambah wacana pembangunan berwawasan ekologi dan berbasis pada pengalaman perempuan; ekofeminisme. Serta diharapkan dapat memperkaya diskursus intelektual dan berdampak pada diamplifikasinya kesadaran ekofeminisme, tidak sekadar pada aktor pembangunan, tetapi juga terhadap kesadaran masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Perdebatan antara antroposentrisme dan ekosentrisme terkesan dikotomis, menjadi tampak berbeda ketika dipusatkan pada diri perempuan. Ini yang membuat ekofeminisme menjadi menarik. Perempuan dipandang memiliki keterkaitan dengan alam, sebagaimana prinsip dari ekofeminisme yang mengklaim bahwa adanya keterkaitan antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam, sehingga pemahaman tentang eksploitasi terhadap alam dipahami melalui realitas penindasan atas perempuan.

Merujuk Putnam Tong (2009), ekofeminisme tetap memiliki perbedaan dengan ekologi, yang mana lebih menekankan pada laki-laki sebagai ‘musuh’ utama perempuan dan alam. Sebab, androsentrisme memusatkan kepengaturan dunia hanya pada laki-laki. Disisi lain, ekofeminisme juga mengkritik ekologi, terutama ekologi-dalam, karena sebagai bagian dari etika ekologi, ekologi-dalam tidak memiliki epistemologis yang memadai untuk menarasikan hubungan antara perempuan dan alam.

Ekofeminisme menjadi aliran baru dalam etika ekologi yang tampak seperti meng-alternatif-kan perempuan dalam menguraikan masalah ekologi (Snyder, 2008). Perempuan menjadi ‘alternatif’ terlihat ketika ekofeminisme tidak sepakat memberikan penjelasan tentang hubungan perempuan dan alam, apakah bersifat biologis, psikologis, sosial, ataupun kultural (Drucker, 2018). Terutama perihal pengakuan adanya perempuan berelasi dengan alam, apakah esensinya harus dihilangkan atau justru dipadankan kembali. Oleh karena itu, di dalam ekofeminisme terdapat pusaran argumen yang berupaya menemukan posisi perempuan dalam berelasi dengan alam

Putnam Tong (2009) membagi menjadi tiga kelompok, yaitu memisahkan hubungan antara perempuan dan alam, menegaskan kembali hubungan perempuan dan alam, serta argumen yang ketiga, menekankan penghilangan hubungan alam dan perempuan. Artikel ini berfokus pada kelompok yang pertama dengan mengkontekstualisasi pemisahan perempuan dengan alam dalam kasus MIFEE sebagai proyek pembangunan berkelanjutan.

Kontekstualisasi pandangan mengenai pemisahan perempuan dan alam dapat ditinjau melalui pendekatan budaya. Menurut Ortner (1996), keterkaitan perempuan dengan alam berakar dari nilai-nilai tradisional. Peran-peran perempuan seperti merawat dan mengasuh semata-mata adalah hasil konstruksi kebudayaan yang menempatkan perempuan, tidak seperti laki-laki yang berada pada superioritas, melainkan memiliki status sekunder di masyarakat.

Laki-laki layaknya kebudayaan lebih superior daripada alam, yang memberikan makna terhadap sistem, termasuk mengatur hubungan manusia dan alam, serta mengontrol dan menguasai alam. Melalui konteks budaya ini dapat dipahami bahwa perempuan secara simbolis diidentifikasi dengan alam, sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan budaya (Moore, 2004). Kontekstualisasi budaya dalam pandangan Ortner (1996) sebenarnya mengarah pada universalitas budaya-lah yang bertanggung jawab mengkonstruksi perempuan dekat dengan alam yang berujung bahwa hampir semua budaya melakukan subordinasi terhadap perempuan.

Ortner (1996) mengkategorikan universalitas subordinasi terhadap perempuan yang diperoleh terkait elemen ideologi budaya yang secara eksplisit memberikan peran dan tugas perempuan kurang prestise daripada yang diberikan kepada laki-laki. Lalu, perangkat simbolik, yang diartikan secara implisit membuat penilaian terhadap perempuan lebih rendah, dan pengaturan struktural sosial yang mengecualikan perempuan dari partisipasi masyarakat (1996). Tercermin pada konsepsi mengenai ibu (mother) dan pengibuan (mothering) yang dianggap menjadi suatu pewarisan alami dalam keluarga, serta turut membangun fungsi universal perempuan untuk tetap berada di wilayah domestik. Dengan begitu, menurut Ortner (1996) kebudayaan memiliki kepentingan untuk membatasi perempuan atas pendidikan, pekerjaan, dan persoalan seksual.

Ekofeminis lainnya menyikapi keterkaitan perempuan dan alam secara lebih kritis. Plumwood (1993) menegaskan bahwa hubungan antara perempuan dan alam yang bersifat inferioritas resiprokal yang tidak hanya berasal dari masa lalu, melainkan terus-menerus terjadi. Inferioritas bersumber dari ‘latar belakang’ (*backgrounding*) telah tertanam dalam rasionalitas sistem ekonomi dan struktur masyarakat kontemporer. Budaya Barat secara dominan dan sistematis merendahkan, ‘melatarbelakangi’, dan menyangkal ketergantungan pada seluruh bidang reproduksi dan subsistensi. Penolakan ketergantungan ini menjadi faktor utama dalam melanggengkan mode penggunaan alam yang tidak berkelanjutan sehingga menjadi ancaman bagi masa depan masyarakat. Bagi perempuan, proses ‘latar belakang’ ini membentuk peran dikotomis perempuan di ranah publik dan privat.

Dalam peran tradisional, kerja perempuan secara sistematis dihilangkan dari perhitungan dalam sistem ekonomi dan tidak diperhitungkan dalam sejarah dan kebudayaan. Secara tradisional, perempuan adalah 'lingkungan'. Padahal, perempuan menyediakan lingkungan dan kondisi yang menjadi tempat 'pencapaian' laki-laki. Akan tetapi, apa yang perempuan lakukan tidak dengan sendirinya dianggap sebagai prestasi (Kroløkke dan Anne, 2005). Perempuan rentan terhadap penolakan bahkan ketika melangkah keluar dari peran tradisional. Plumwood (1996) mencontohkan ‘latar belakang’ yang tampak jelas ketika perempuan berperan sebagai ibu. Keterampilan fisik, pribadi, yang diajarkan kepada sang anak merupakan ‘latar belakang’ pembelajaran yang didefinisikan sebagai bagian dari ranah akal budi dan pengetahuan pria.

Plumwood (1993) memfokuskan analisisnya pada rasionalisme dan dualisme yang merujuk pada a gendered reason and nature contrast sebagai bentuk sentral dalam pemikiran Barat yang diuraikan dalam struktur dualistik seperti budaya dan alam, pikiran dan tubuh, laki-laki dan perempuan, serta subjek dan objek. Namun, hubungan ini berbeda dari dikotomi, non-identitas, atau perbedaan dengan konstruksi penindasan yang sistematis.

Menurut Hawkins (1993), pengertian tentang master yang menunjukkan superioritas terhadap other sebagai entitas yang inferior. Setidaknya terdapat lima karakteristik dualisme, yaitu (1) latar belakang atau penolakan, (2) eksklusi atau hiper-separasi radikal sebagai bentuk diskontinuitas absolut, (3) penggabungan atau definisi relasional, di mana other didefinisikan dalam hal kurangnya kualitas yang dimiliki oleh master, sebaliknya, hanya yang berkualitas dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan dan keinginan master; (4) instrumentalisme atau objektifikasi, di mana other hanya diakui sebagai objek, sumber daya atau sarana untuk tujuan master daripada sebagai subjek yang memiliki tujuan sendiri; dan (5) homogenisasi atau stereotip, di mana semua anggota kelas yang tertindas dipandang seragam dan stereotip, dilucuti dari semua individualitas atau perbedaan. Karakteristik ini yang menjelaskan dualisme, yang diidentifikasi sebagai "garis fraktur" yang paradigmatik dalam seluruh kebudayaan Barat. Bahwa hampir semua hal pada sisi 'superior' direpresentasikan sebagai bentuk-bentuk akal, sedangkan semua yang berada di bawah dapat direpresentasikan sebagai bentuk-bentuk alam.

Pemahaman tentang eksklusi dan dominasi akal dalam budaya Barat tidak hanya mencakup perempuan dan alam. Namun, berlaku pada semua tatanan kehidupan.. Inilah yang diekspresikan dalam konsepsi akal yang dominan dan memunculkan struktur dua sisi yang berbeda yang diistilahkan sebagai identitas sang master. Menurut Plumwood (1993) dalam kekuasaan tirani, manusia dipilih untuk melakukan penindasan secara sewenang-wenang. Tetapi dalam bentuk kekuasaan yang sistematis, kekuasaan biasanya dilembagakan dan 'dinaturalisasi' dengan mengaitkan pada bentuk-bentuk perbedaan yang ada.

Dalam budaya Barat, manusia ditempatkan pada posisi-posisi dominan yang sepenuhnya dapat dipahami sebagai dualisme. Dualisme terkait erat dengan dominasi dan akumulasi ekspresi terhadap pembenaran budaya. Pengkontrasan manusia dengan alam menjadi salah satu bentuk dualisme yang menjadi bagian dari himpunan dualisme yang saling terkait.

Masing-masing memiliki koneksi penting ke elemen lain dan memiliki struktur yang sama dengan yang lain. Dualisme juga merupakan logika kolonisasi yang harus dilihat sebagai pembentukan sistem dan struktur yang saling ketergantungan.

Hasil dan Pembahasan

Merauke ditetapkan menjadi pusat pengembangan pangan nasional melalui pengesahan proyek MIFEE dengan mengacu pada Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) pada tahun 2010. Studi Dewi (2016) menunjukkan MIFEE diklaim sebagai proyek pembangunan berkelanjutan karena mengembangkan konsep *food estate* yang mengintegrasikan produksi pangan yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Proyek MIFEE dicanangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, sama seperti pendahulunya, yaitu Revolusi Hijau, yang berhasil menciptakan swasembada beras.

Studi Dewi (2016) mengemukakan pemilihan Merauke menjadi basis produksi pangan karena dianggap sebagai ‘lahan tidur’ yang potensial. Didukung juga oleh alasan lain, yaitu pada masa kolonial Belanda, Merauke pernah menghasilkan lumbung padi untuk kawasan Pasifik Selatan. Disamping itu, MIFEE merupakan transformasi proyek pembangunan pertanian milik pemerintah daerah yang tercantum dalam program *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) yang terfokus pada penanaman padi sejak tahun 2007.

Pengambilan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan MIFEE dilatarbelakangi oleh masuknya Indonesia dalam kelompok negara *lower middle income* country yang memiliki rentang pendapatan per kapita nasional sebesar USD 1.026 hingga USD 4.035 pada waktu itu (Saputra, 2014). Masterplan pembangunan nasional yang menaungi realisasi pusat pengembangan pangan, memberikan MIFEE landasan struktural yang cukup kuat.

Beberapa peraturan yang menaungi MIFEE antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan di Luar Kegiatan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) yang menjadikan Papua termasuk dalam kawasan sektor pertanian untuk program ekonomi tahun 2008-2009; dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 23 Tahun 2010 tentang MIFEE.

Konsep pengembangan pangan atau food estate menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam sektor pertanian berdasarkan pada gagasan Our Common Future yang digagas pertama kali oleh World Commision on Environment and Development (WCED) pada tahun 1989. Pembangunan berkelanjutan memastikan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak menyiratkan batasan menerapkan teknologi yang berdampak terhadap sumber daya lingkungan sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Akan tetapi, dengan pengelolaan teknologi dan pengorganisasian sosial menjadi era baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gagasan Our Common Future ini menganggap bahwa kemiskinan merupakan permasalahan endemik yang akan selalu rentan terhadap bencana ekologis dan lainnya. Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik (UN, 2012)

Dalam konteks pelaksanaan dalam proyek MIFEE, pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk percepatan pembangunan yang berorientasi pada masa depan demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam MIFEE ditinjau dari sisi pengembangan wilayah, integrasi sektor dan sub-sektor, pendekatan lingkungan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi pengembangan wilayah, *food estate* menjadi upaya perluasan dan peningkatan produksi pangan yang bertujuan menciptakan sentra produksi pangan serta mendorong perekonomian wilayah. Pengintegrasian sektor dan sub-sektor menekankan sisi keterlibatan pengelolaan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan petani.

Pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan dilihat melalui penggunaan sumber daya yang dapat tergantikan dan minim polusi serta dampak lingkungan (Jaya, 2004). Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemerintah bertugas mengarahkan sektor swasta untuk melakukan kerjasama secara terpadu bersama petani lokal. Kerjasama yang berbentuk kemitraan swasta dan masyarakat didasarkan pada kepemilikan natural aset berupa tanah ulayat masyarakat adat. Tujuan pemanfaatan dari bagi hasil swasta dan masyarakat adalah untuk membiayai investasi yang menjadi modal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Pendekatan neoliberalisme yang diterapkan dalam mega proyek ini, memperlihatkan keberpihakan negara yang mempersilakan perusahaan-perusahaan untuk menggarap ‘lahan tidur’ di Merauke (Zakaria dkk, 2011). Keberpihakan ini kasarnya mengusir keberadaan komunitas asli Orang Marind yang sudah ratusan tahun mendiami wilayah tersebut. Mirisnya, fakta peminggiran ini dilakukan oleh negara diatas cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Papua secara umum, melalui pembacaan literatur teks-teks, perempuan Papua mempengaruhi keberlangsungan alam.

Studi Hardiningtyas (2016) menunjukkan kehidupan Suku Wamesa dan Irarutu di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang bergantung pada ekosistem hutan mangrove, yang memusatkan perempuan menjalankan tugas produktif, reproduktif, dan sosial sekaligus. Dalam pemenuhan kebutuhan domestik, perempuan berperan penting dalam memperhatikan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan. Ketika mencari kayu bakar di hutan, perempuan tidak melakukan penebangan, melainkan hanya memungut ranting-ranting tumbuhan yang sudah kering (Darmanto, 2014).

Pada lingkup Orang Marind, kekerabatan erat dengan alam, terutama keterikatan dengan tanah terbentuk secara spiritual. Keterikatan ini juga mengikat Orang Marind dengan tanah dalam hubungan sosial. Pembentukan identitas, proses produksi material, termasuk pertukaran sosial dalam komunitas Orang Marind, ditentukan oleh penguasaan tanah. Oleh karena itu, bagi Orang Marind, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi.

Nilai tanah sangat bergantung, salah satunya, pada perubahan lanskap dan perubahan lokasi kekuasaan internal dan eksternal. Hak atas tanah ditentukan oleh interaksi sosial. Keputusan penggunaan tanah sangat jarang ditentukan oleh individu, melainkan berdasarkan garis keturunan, sejarah penggunaan tanah, sejarah hubungan sosial antar anggota marga, dan mitologi komunitas etnis Orang Marind. Meskipun tanah melekat dalam hubungan sosial Orang Marind, namun tanah tidak bermakna sebagai komoditas (Darmanto, 2014).

Merujuk pada kosmologi Orang Marind, alam dipandang sebagai seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan. Khususnya hutan, yang menyediakan segala kebutuhan pangan, seperti sagu, hewan buruan, dan berbagai jenis tumbuhan. Layaknya seorang ibu bertugas mengasuh, merawat dan memberi kenyamanan, maka hutan adalah rumah dimana sebagian besar komunitas etnis di Kabupaten Merauke tinggal. Termasuk pula Orang Marind yang hidup di hutan secara pindah-pindah.

Orang Marind merasa bahwa hutan adalah nenek moyang mereka, tempat di mana Orang Marind berasal (Barahamin, 2015). Hal ini terlihat dari setiap marga Orang Marind yang mengasosiasikan dirinya dengan tumbuhan atau hewan di hutan. Misalnya, marga Gebze yang melambangkan dirinya dengan pohon kelapa, identitas marga Samkakai yang melekat pada kangguru, marga Mahuze yang mengobjektifikasi dirinya lewat sagu, marga Kaize yang mengasosiasikan kelompoknya melalui kasuari.

Kemelekatan identitas Orang Marind dengan hutan menunjukkan besarnya ketergantungan Orang Marind terhadap alam. Konsekuensi ketika hadirnya MIFEE yang mengalihfungsikan hutan menjadi lahan non hutan pun mengancam hilangnya identitas diri Orang Marind. Masifnya teknologi yang diterapkan dalam investasi pertanian mega proyek MIFEE tidak signifikan bagi penghidupan Orang Marind, sebab, kehidupan Orang Marind yang bersumber dari alam itu dianggap tertinggal. Peningkatan produktivitas produk pertanian merupakan prioritas utama dalam proyek MIFEE. Upaya ini menjadi pembelaan untuk mewujudkan modernisasi pertanian. Disisi lain, kebergantungan terhadap alam sebagai entitas budaya masyarakat seringkali diabaikan oleh pihak yang berkuasa.

Pola perampasan lahan dalam proyek MIFEE berhasil menjadi praktik marginalisasi terhadap Orang Marind di tanah kelahirannya sendiri. Orang Marind menjadi terancam karena harus mengubah jati dirinya, dari kebiasaan makan sagu menjadi makan nasi. Perubahan pola makan ini mengartikan ‘jawanisasi’, di mana pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan menggantikan hutan sagu menjadi lahan sawah yang dengan terpaksa harus mendatangkan tenaga kerja petani dari luar yang kebanyakan dari Pulau Jawa. Situasi ini dapat menjadi lebih parah karena kedatangan tenaga kerja yang lebih terampil akan menggantikan komunitas asli Papua. Dengan kata lain, proyek MIFEE menjadikan Orang Marind persis seperti anak yang dipisahkan dari ibu kandungnya.

Perempuan sebagai makhluk yang memiliki hubungan terhadap alam pun akan mulai bergeser dimana peran mereka untuk mengambil sumber makanan di alam akan bergeser untuk bercocok tanam, sehingga hal itu akan memunculkan adanya sikap untuk memperoleh keuntungan dari alam secara finansial dengan adanya proyek tersebut. Padahal sebelumnya masyarakat Papua memperoleh makanan itu tanpa pernah memikirkan tentang keuntungan secara finansial yang harus mereka pikirkan tetapi hanya berpikir bahwa dengan menjaga alam tetap terjaga dan lestari maka kebutuhan akan hidup mereka akan terpenuhi.

Maka bisa dikatakan bahwa program tersebut akan menciptakan kerusakan terhadap alam yang ada dan manusia akan memiliki kecenderungan untuk menciptakan kerusakan yang ada. Sudah seharusnya pemerintah memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua bukan mengarahakan cara hidup orang papua dengan orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan yang dimana setiap hari memakan nasi, bukan memakan sagu.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah saat ini hanyalah bualan semata untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu yang dimana mereka bukanlah masyarakat adat papua, karena nyatanya sebenarnya mereka tidak membutuhkan itu untuk maju. Adanya proyek ini hanya akan memunculkan terjadinya kerusakan saja, sehingga seharusnya pemerintah lebih memahami dan mampu memetakan daerah mana saja yang bisa dicanangkan untuk program ini, bukan untuk semua daerah untuk dipaksa makan nasi, karena hal itu mengingatkan kita akan masa lalu bangsa ini yang sebelum adanya pertanian kita semua masihlah makan sagu. Dengan bergesernya konsumsi pokok masyarakat Papua dari sagu ke beras maka akan menciptakan kerusakan lingkungan yang nyata, karena hutan pada akhirnya akan berkurang dan hilang.

Namun ketika semua proyek itu sudah berada dalam proses, maka hal itu tidaklah bisa dihindari lagi. Masalah muncul karena penguasaan atas lahan yang ada itu sudah seharusnya bukan milik investor ataupun privat. Akan tetapi, lahan seharusnya dikuasai oleh masyarakat asli Papua agar hal itu bisa menciptakan pertumbuhan secara ekonomi maupun sosial masyarakat Papua. Jika hal itu tidak bisa dilaksanakan maka seharusnya negara adalah organ yang menguasai dan mengelola itu untuk digunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran masyarakat papua. Bukan hanya untuk mensejahterakan segelintir pengusaha. Karena jika hal itu dikuasai oleh privat maka hal itu tak ubahnya seperti perkebunan sawit yang kebanyakan dikuasai oleh sekelompok pengusaha terutama pengusaha asing.

Ketika membicarakan tentang pembangunan maka sudah menjadi suatu konsekuensi bagi negara untuk menciptakan adanya kerusakan terhadap sistem tatanan alam yang ada. Sistem tatanan yang dimaksud yaitu antara manusia dengan alam ataupun alam dengan alam itu sendiri. Pembangunan secara fisik, seperti MIFEE yang digalakkan di Papua, diklaim sebagai pembangunan pertanian yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Padahal yang terjadi sebaliknya, sebagai pembangunan pertanian berkelanjutan terdapat kesalahan dalam menafsirkan tentang Papua, bagaimana orang Papua hidup, termasuk bagaimana orang Papua memperoleh makanan secara langsung dari alam.

Dalam kehidupan Suku Wamesa dan Irarutu, perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih banyak daripada laki-laki. Disamping memenuhi ‘perut keluarga’ seperti mencari ikan atau karaka (kepiting) dan menokok sagu yang kemudian dijual ke pasar, perempuan Suku Wamesa dan Irarutu juga harus menjalankan peran sebagai ibu yang bertugas untuk mendidik dan mensosialisasikan anak-anaknya tentang pengelolaan alam. Berbagai peran yang dipraktikkan perempuan Suku Wamesa dan Irarutu seringkali mendapat predikat bahwa perempuan menjalankan beban ganda.

Alih-alih perempuan Suku Wamesa dan Irarutu dianggap tersubordinasi karena berada di ranah domestik, namun sebenarnya itu menjadi upaya perempuan Suku Wamesa dan Irarutu dalam menjaga keanekaragaman hutan mangrove. Justru perempuan-lah yang menguasai pengetahuan tentang alam sebagaimana tercermin dalam kegiatan mencari karaka dan menokok sagu. Sagu adalah makanan pokok bagi masyarakat Papua, bukan nasi. Masyarakat Papua memang mengandalkan hutan sebagai sumber makanan bagi keberlangsungan hidup bagi mereka.

Mereka yang sehari-hari tinggal berdekatan dengan alam, hanya perlu masuk ke dalam hutan dan menebang pohon sagu untuk diolah menjadi makanan. Di hari itu juga mereka bisa mencukupi kehidupan keluarga selama berbulan-bulan tanpa harus menanam. Untuk memperoleh lauk-pauk, mereka hanya perlu membawa tombak atau panah untuk berburu hewan ataupun ikan di hutan dan kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi.

Kehidupan Suku Wamesa dan Irarutu setidaknya cukup menggambarkan kehidupan Orang Marind di Kabupaten Merauke yang menekankan alam sebagai pusat kehidupan. Ketika adanya proyek MIFEE tentu akan mempersulit penghidupan Orang Marind karena hanya akan menjauhkan mereka terhadap alam. Hadirnya proyek MIFEE yang digadang-gadangkan itu, jelas bertentangan dengan konsep hidup orang-orang Papua yang menggantungkan hidupnya terhadap alam. Masyarakat Papua selama ini tidak perlu melakukan usaha pertanian ataupun peternakan, karena alam sudah menyediakan semua kebutuhan. Akibatnya, sikap ketergantungan terhadap alam mulai tersingkirkan, dan lambat laun kepedulian mereka terhadap alam pun akan hilang pula.

Dualisme sebagai Bentuk Diskontinuitas Perempuan dan Alam

Proyek MIFEE menjadi kekerasan budaya bagi masyarakat Papua, terutama yang dialami oleh perempuan. Bagi sebagian pendapat ekofeminis, fakta tentang kapasitas prokreasi perempuan yang menjadi sumber ikatan biologis yang memberi kehidupan. Menurut Longenecker (1997), hubungan dengan alam ditunjukkan sifat metaforis seperti “alam ibu" (mother nature) atau "ibu bumi" (mother earth). Dalam mitologi Suku Wamesa, binatang berjenis kelamin betina yang hidup di hutan merupakan nenek moyang Suku Wamesa. Binatang berjenis kelamin betina ini diyakini melahirkan manusia. Personifikasi binatang yang melahirkan manusia memang menunjukkan sifat feminin yang lekat dengan perempuan.

Di sisi lain mitos Suku Wamesa juga mengartikan bahwa sebetulnya dari alam-lah manusia lahir. Bahwa sejak dulunya manusia telah hidup dan tinggal berdekatan dengan alam. Simbolisasi alam sebagai ibu menunjukkan sebuah penghormatan bahwa agar manusia dapat menjaga dan melestarikan alam. Kehidupan yang dekat dengan alam menandakan tidak ada hierarki antara manusia dengan alam, atau antara manusia dan hewan. Orang-orang saling peduli satu sama lainnya dan bahkan terhadap non manusia yaitu untuk alam, dimana bumi dan hutan dipertahankan ‘misteri’, kekuatan dan keutuhannya. Setidaknya ini menjadi sebagian gambaran tentang kehidupan yang dikendalikan oleh karakteristik feminin dari alam.

Pada kenyataannya, manusia sebagai anak dari alam telah berbuat durhaka kepada ibu melalui eksploitasi alam. Melalui kekuatan teknologi dan militer, alam ditundukkan dibawah kekuatan ekonomi global demi pencapaian menguasai bumi. Penguasaan teknologi memadamkan, baik alam maupun budaya yang 'tidak rasional'. Akibatnya, manusia harus menghadapi kenyataan hilangnya hutan bersamaan dengan sebagian besar keanekaragaman spesies dan manusia. keanekaragaman budaya. Padahal, banyak budaya yang memiliki dasar pola bertahan hidup yang selama ratusan tahun (Moore, 1998).

Munculnya spesies pembangunan dan 'kemajuan' merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Kehadirannya hadir dengan tujuan untuk menghasilkan kehancuran alam dan ketimpangan yang tak terhindarkan, seperti yang menghasilkan polusi dan limbah. Sebabnya ialah dominasi manusia 'rasional' yang akhirnya mengancam dan menghasilkan hasil yang paling tidak rasional, berupa kepunahan spesies. Menurut pemikiran Plumwood (1993), mengatakan bahwa kehidupan dunia yang didominasi oleh ‘laki-laki’ bukan suatu kebetulan. Apabila membandingkan feminitas dalam menguasai alam, maka dapat perempuan dapat melepaskan diri dari segala bentuk dominasi.

Plumwood (1993) menggambarkan penguasaan yang feminin itu diibaratkan dengan sebuah planet dengan ekosistem yang sehat dan seimbang. Terutama dalam sistem pengaturan kehidupan yang berkelanjutan. Salah satu yang penting dari pendekatan ekofeminisme, yaitu memberikan nilai positif pada hubungan perempuan dengan alam. Berbeda dari itu, pandangan Barat justru memberikan penilaian yang negatif terhadap keterhubungan keduanya, sehingga pandangan ini yang menjadi utama devaluasi dan penindasan perempuan.

Bentuk-bentuk penindasan dari masa lalu sebenarnya masih meninggalkan jejak sebagai jaringan dualisme. Struktur logis dari dualisme membentuk dasar utama hubungan antara bentuk-bentuk penindasan. Konsep dualisme merupakan pemikiran filosofis dan menyediakan landasan terhadap feminis, namun terbatas pada pengartikulasian secara samar-samar.

Plumwood (1993) mengkaji konsep dualisme dalam ekofeminisme secara lebih lengkap dengan menekankan pada kritik terhadap politik dan budaya. Budaya Barat telah memperlakukan hubungan manusia dan alam sebagai dualisme, yang menjelaskan perlakuan Barat terhadap alam telah mendasari krisis lingkungan. Terutama konstruksi Barat tentang identitas manusia yang didefinisikan sebagai 'diluar' alam. Analisis yang mendetail tentang dualisme, menunjukkan bahwa struktur logis yang memperlihatkan keberbedaan (otherness) dan penegasian.

Konsep nalar (akal) menentukan cara pandang terhadap alam, seperti konsep suami untuk istri sebagai tuan bagi budak. Akal dalam tradisi Barat telah dikonstruksi sebagai wilayah istimewa dari ‘master’ untuk memahami alam sebagai seorang istri atau bawahan yang meliputi dan mewakili bidang materialitas, subsistensi, dan feminin yang telah dipisah dan dibangun oleh ‘sang master’. Menguasai domain alam secara terus-menerus dan kumulatif berangkat dari alasan untuk melahirkan konsep kemajuan dan pembangunan.

Pandangan Plumwood (1993) tentang master dikaitkan dengan laki-laki dalam budaya patriarki karena identitas maskulin yang melekat pada laki-laki. Identitas master ini yang mengkonstruksi eksploitasi alam, seperti halnya ayah yang mengambil keuntungan dari anak yang dimilikinya serta merendahkan peran ibu dalam pengasuhan.

Penjelasan tentang eksklusi akal dalam perjuangan pembebasan menjelaskan hubungan konseptual antara berbagai kategori dominasi, terutama dominasi manusia dengan dominasi alam. Alam merupakan ranah eksklusi dan kontrol yang berganda. Eksklusi tidak hanya terjadi pada non-manusia, tetapi juga berbagai kelompok manusia dan aspek kehidupan manusia yang berperan sebagai alam. Dalam konteks ini, kolonialisme dan seksisme telah membentuk konseptual tentang perbedaan seksual, ras dan etnis yang mirip dengan hewan dan tubuh. Hal ini ditafsirkan sebagai ruang inferioritas, sebagai bentuk kemanusiaan yang lebih rendah dan tidak memiliki ukuran rasionalitas.

Hubungan antara bentuk-bentuk dominasi Barat merupakan hasil evolusi historis tertentu, yang terbentuk dari keharusan logika dominasi antara diri dan other serta akal dan alam. Alam dalam konteks ini didefinisikan sebagai pasif, sebagai non-agen atau non-subjek. Lingkungan didefinisikan kondisi latar belakang yang tidak kelihatan yang dengannya 'latar depan' pencapaian akal. Pemikiran Plumwood (1993) bertujuan untuk menganalisis dualisme antara nalar dan alam serta dampaknya pada hubungan manusia. Dengan karakteristik lebih lanjut pada lingkup diri dan lainnya (*other*), ruang publik atau privat, serta dualisme nalar dan emosi.

Kesimpulan

Munculnya ekofeminisme atau feminisme ekologis bertujuan mendekonstruksi secara kritis atas dominasi historis, budaya, dan sosial terhadap perempuan dan alam. Perhatian kritis terhadap penindasan perempuan dan krisis lingkungan meningkatkan kesadaran tentang politik kekuasaan yang melibatkan penderitaan berbagai kelompok yang terpinggirkan sebagai bawahan. Kasus MIFEE mencerminkan perlakuan terhadap alam berdampak terhadap relasi perempuan dan alam. Pola perampasan lahan dalam proyek MIFEE berangkat dari paradigma dualisme yang menekankan diferensiasi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, alam harus tunduk dibawah kepentingan manusia. Ini berakibat pada praktik marginalisasi terhadap Orang Marind di tanahnya sendiri. Terutama, perempuan yang semula memiliki otonomi pengetahuan tentang pengelolaan alam dan pemenuhan menjadi terpinggirkan. Pelaksanaan MIFEE yang terwujud dalam intensifikasi lahan pertanian monokultur yang dibingkai wacana 'kedaulatan pangan', pada akhirnya merupakan ditujukan untuk segelintir pihak tertentu.

Daftar Pustaka

Barahamin, Andre. 2015. Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida terhadap Malind-Anim melalui Mega Proyek MIFEE. (https://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-mifee/) diakses pada tanggal 15 Desember 2019

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. New York: Routledge

Charlotte dan Anne S. Sørensen. 2005. Gender Communication Theories & Analyses: From Silence to Performance

Darmanto, 2014. Biografi Tipis Tanah Marind Anim. Wacana Jurnal Transformasi Sosial, Vol. 16, No. 33: (235-245)

Dewi, Rosita. 2016. Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahn Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke. (http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/448/261) diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

Drucker, Sally Ann. 2018. Betty Friedan: The Three Waves of Feminism. (http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/) diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Hardiningtyas, Puji Retno. 2016. Resistansi Perempuan Papua di Lingkungannya dalam Roman Isinga Karya Dorothea Rosa Herliany.

Hawkins, Ronnie Zoe. 1998. Ecofeminism and Nonhumans: Continuity, Difference, Dualism, and Domination. Hypatia, Vol. 13, No. 1.

Jaya, Askar. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Katila, Pia, dkk. 2020. Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People. United Kingdom: Cambridge University Press.

Longenecker, Marlene. 1997. Women, Ecology, and the Environment: An Introduction. NWSA Journal, Vol. 9, No. 3: (1-17)

Mahoney, Kate. 2016. Historicising the Third Wave: Narratives of Contemporary Feminism. Women's History Review. (DOI: 10.1080/09612025.2015.1131052)

McCarthy, John F dan Krystof Obidzinski. 2017. Framing the Food Poverty Question: Policy Choices and Livelihood Consequences in Indonesia. Journal of Rural Studies, Vol. 56: (344-354)

Moore, Henrietta. 1998. Feminisme dan Antropologi. Terjemahan Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI.

Moore, Niamh. 2004. Ecofeminism as Third Wave Feminism? Essentialism, Activism, and the Academy

Ortner, Sherry. 1996. Making Gender: The Politics and Erotics of Culture.

P.M. Laksono, et.al. 2000. Perempuan di Hutan Mangrove: Kearifan Ekologis Masyarakat Papua. Yogyakarta: Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada.

Plumwood, Val. 1993. Feminism and the Mastery of Nature. Routledge: London.

Putnam Tong, Rosemarie. 2009. Feminist Thougt. Colorado: Westview Press

Rumusan Seminar Nasional "Food Estate di Indonesia". 2010. Bogor.

Saputra, Wiko. 2014. Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya Hak Dasar Masyarakat: Kritik dan Kajian terhadap Kebijakan MP3EI 2011-2025. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

Setiawan, Tomi. 2017. Ethnodevelopment: Solusi Atas Kegagalan Kebijakan Pembangunan pada Masyarakat Adat..

Siscawati, Mia dan Noer Fauzi Rachman. 2015. Gender dan Politik Konsesi Agraria. Working Paper Sajogyo Institute.

https://suarapapua.com/2016/06/18/mifee-dan-ancaman-eksistensial-masyakarat-papua/

Snyder, R. Claire. 2008. What Is Third-Wave Feminism? A New Directions Essay. Signs, Vol. 34, No. 1: (175-196). The University of Chicago Press

Suseno, Franz-Magnis. 1999. Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia

Susilawati. 2017. Feminisme Gelombang Ketiga. (https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/feminisme-gelombang-ketiga) diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Thompson, Suzanne, dan Michelle. 1994. Ecocentric and Anthropocentric Attitudes Toward The Environment. Journal of Environmental Pscychology, No. 14 : (149-157)

Thompson, Charis. 2006. Back to Nature? Resurrecting Ecofeminisme After Post-structuralist and Third- Wave Feminisims. Isis, Vol. 97. No. 33: (505-512)

United Nation, 2012. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UN-DESA_Back_Common_Future_En.pdf

Zakaria, R.Yando, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky. 2011. MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind. Jakarta: Yayasan PUSAKA

Bionarasi Penulis:

Krisnaldo Triguswinri, Akademisi. Lahir 24 Oktober 1996. Menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Diponegoro. Bukunya yang telah terbit adalah Jazz untuk Nada (Puisi; 2016) Tidak Ada Pagi Revolusi, Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta (Esai; 2021) dan Hari-Hari Berbagi Api: Gerakan Sosial, Wacana Alternatif dan Kritik Kapitalisme (Esai; 2022).

Bionarasi Penulis:

Krisnaldo Triguswinri, Akademisi. Lahir 24 Oktober 1996. Menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Diponegoro. Bukunya yang telah terbit adalah Jazz untuk Nada (Puisi; 2016) Tidak Ada Pagi Revolusi, Sementara Ada Pagi Jatuh Cinta (Esai; 2021) dan Hari-Hari Berbagi Api: Gerakan Sosial, Wacana Alternatif dan Kritik Kapitalisme (Esai; 2022).

PERJALANAN

Bintang Prakasa

Gumpalan asap
menyerang nafas
para kaum proletar

Gedung-gedung tinggi
membuat ilusi-ilusi
bagi pekerja yang gajinya dikebiri

Segerombolan makhluk
terjebak di busway sore itu
muram
lelah
bak diperkosa oleh korporat sialan

Makhluk-makhluk kebingungan
sehari-harinya mereka dipukul kenyataan
dicekik keadaan

Menadahkan tangan
berharap dikasihani oleh tuhan
sungguh malang, wahai engkau makhluk-makhluk terpinggirkan

HUTAN HITAM PUTIH

Riski Saputra

Dari sebiji benih,
Akarku menari menembus perut bumi,
Mengukir rekahan, mengalirkan hujan,
Memeluk tanah tetap rapat,
Menjaga kehidupan di bumi selalu harmonis.

Batangku menjulang, merangkul langit,
Ranting dan daun ku menari-nari mengikuti irama angin,
Menyerap cahaya, menyaring udara,
Rumah bagi makhluk kecil dan besar,

Manusia-manusia dulu merawatku,
lalu memberi mereka kehidupan,
Memulihkan jiwa-jiwa yang letih lesu,
dan membiarkan beberapa nyawaku untuk rumah dan api mereka,

Namun dalam dua ratus tahun segalanya berubah,
Manusia menjadi tergesa, rakus, dan tamak
Atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi,
Aku dibabat tanpa ampun,

Aku diam, tapi aku rindu kehidupan yang harmonis,
Dalam dua dekade, pelan-pelan aku bersuara,
Melepas cengkraman tanah, membiarkan hujan menggenang bahkan menjadi bandang,
Membiarkan ratapan demi ratapan,
Tanpa suara, aku berteriak “Pulihkan Aku!”

Untuk setiap penikmat hutan dan puisi,
Selamat Hari Hutan,
Selamat Hari Puisi.

21.03.2024

JANGAN RUSAK HIJAU KAMI

Kaum Marjinal

Tak peduli etnis, warna kulit, model rambut, aliran musik, agama, partai politik, bendera warna apa yang kalian kibarkan atau segalanya yang melekat pada diri kalian, mengenai apa yang ada di dalam semesta ini: kita semua berhak menjaganya. Inilah jika nantinya setiap insan manusia telah meyakini dan mengejawantahkan dari apa yang ada di dalam biosentrisme atau ekologi dalam itu sendiri. Seperti dalam Ekologi Revolusioner karya Judi Bari yang diterjemahkan oleh Anjani: biosentrisme merupakan bentuk keyakinan di mana alam tidak diciptakan untuk melayani syahwat manusia. Saya menambahkan syahwat di sini sebagai kata lain dari hasrat manusia yang mesti mengeksploitasi alam ini demi kepentingannya. Entah pribadi ataupun golongan yang hanya fokus pada profit.

Izinkan saya memberi satu kasus yang menusuk hati ketika mendengar beritanya. Kasus tersebut adalah kasus kebun Plasma di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023 yang berujung hilangnya nyawa masyarakat sekitar. Terdengar hiperbola memang, namun memang begitu adanya. Polisi dengan sengaja menghalalkan tindak represi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan yang baru saja menginjakkan kakinya di wilayah tersebut. Polisi dikerahkan untuk membendung tindakan warga yang merugikan kontrak transaksional antara polisi, perusahaan terkait, atau bahkan lebih parahnya lagi dengan penguasa (bc: pemerintah) setempat. Bahkan polisi tersebut bukan lagi membendung, melainkan telah berniat sebelumnya untuk menumpas warga yang menolak adanya proyek.

Kasus tersebut merupakan satu kasus dari sekian banyaknya kasus mengenai kerusakan alam, atau gerakan yang mengarah kepada hal tersebut. Tidak jarang juga orang yang katanya diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin justru turut andil dalam mengeksploitasi alam. Memang, tidak ikut dalam menebang pohon, mengeruk tambang, menjerat ikan menggunakan pukat harimau atau bahkan bom sekalipun, mereka yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin kerap kali justru menyetujui proyek yang disodorkan oleh pemilik modal untuk menggali dan terus menggali kekayaan yang berada di wilayah kekuasaannya. Mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin atau khalifah abal-abal pada tingkatan atas hingga bawahnya beserta pemodal pun acapkali mengumbar janji mengenai kesejahteraan warga yang ada di sekitar perusahaan yang akan dibangun. Mereka hanya ingin mengeruk kekayaan alam tanpa memiliki niatan untuk memulihkan atau menghijaukan kembali. Dan polisi tidak lebih seperti robot yang hanya menjalankan tugasnya untuk menyukseskan eksploitasi.

Apa yang dapat kita harapkan kepada pelaku perusakan alam dengan dalih demi kemakmuran bersama? Faktanya, kemakmuran yang digaungkan tersebut tidak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan. Kemakmuran yang dikoar-koarkan merupakan tipu muslihat berisi kerusakan alam yang dibalut. Inilah yang menjadi tugas penting bagi kita semua untuk terus merawat alam dan melawan segala bentuk dominasi. Meski alam ini menawarkan utilitas bagi makhluk hidup terutama kita sebagai manusia, bukan berarti kita harus memanfaatkannya dengan mengeruk dan terus mengeruk lalu meninggalkan galian tersebut tanpa adanya pemulihan yang signifikan. Karena hal ini akan mendatangkan katastrofe. Bahkan tidak jarang mereka yang tamak ini bersikap pasif terhadap bencana. Alih-alih memberi penjelasan yang rasional, mereka akan tebal muka dan mengatakan di depan khalayak jika banjir dan bencana lainnya adalah kuasa dari entitas transendental. Tidak hanya itu, sebelum bencana itu terjadi, mereka akan menyiasati kalian untuk menyetujui konsesi demi profit tanpa mengindahkan kehidupan makhluk hidup sebelumnya di tanah yang akan mereka gunakan. Kalaupun jika ditelisik, bencana tersebut bisa jadi karena ulah mereka sendiri.

Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berserah diri dan merapalkan mantra-mantra hasil dari kitab suci? Dan menyatakan bahwa bencana merupakan takdir dari yang Maha Tinggi?. Bangun dan sadarlah!. Musuh kalian adalah penguasa yang menyandarkan segalanya pada kapitalisme beserta kroninya. Maka bersatu dan perkuatlah solidaritas yang berlandaskan sosialisme libertarian. Tanpa pandang berasal dari suku apa dan beragama atau tidaknya kalian, mari kita perkuat barisan serta rangkul sekitar untuk melawan dan mengkampanyekan bahwa pemerintah dengan sadisnya telah mengeksploitasi apa-apa yang seharusnya dilindungi di alam ini. Karena sejatinya kita adalah bagian dari alam itu sendiri dan kita tidak memiliki hak untuk merusaknya.

TERUSLAH TUMBUH TANPA RAGU

Kaum Marjinal

Jika kalian merasa hebat

Dengan alat berat hutan kalian babat

Katanya dialih gunakan menjadi pemasukan negara dan demi maslahat

Yang sebenarnya dialih gunakan menjadi warisan keluarga pemodal beserta koleganya

Maka jangan salahkan kami

Yang mengepalkan tangan dan terus lantang menyuarakan

Bunyi-bunyi perlawanan

Kami terus tumbuh dalam kemelaratan yang kalian cipta!

Meski moncong senjata di hadapan

Kami tak kecut hati

Karena kalianlah yang terus-terusan memerkosa bumi!

Karena kalianlah yang terus membunuh kami!

TERUS MENANAM, TERUSLAH TUMBUH

Neesa

TAMBANG HARUS TUMBANG

Neesa

Manusia dan perbuatannya adalah dua hal yang berbeda. Jika perbuatan itu baik akan diterima dengan baik, tapi jika perbuatan itu jahat akan ditentang. Dengan demikian si pelaku perbuatan itu, apakah yang baik atau yang jahat, akan selalu dihormati atau dikasihani sesuai perbuatannya. "Bencilah dosanya, tapi jangan orang yang berbuat dosa" adalah suatu ajaran yang walau cukup mudah dapat dipahami namun jarang sekali diterapkan orang dan itulah sebabnya maka racun kebencian selalu tersebar luas di muka bumi ini.